

Strategi Lembaga Pendidikan Islam Dalam Menjawab Tantangan Pendidikan Kontemporer

M. Nur Lukman Irawan^{1*}, Ahmad Yasir², Anita³, Shohib Hasan⁴

^{1,2,3,4} Institut Agama Islam An Nur Lampung

Email : abualy5873@gmail.com¹, ahyasalma91@gmail.com², anita.hayfa99@gmail.com³, shohib.hasan96@gmail.com⁴

Abstrak

Pendidikan adalah hak setiap orang, dan pendidikan itu harus dirancang untuk membantu mereka mewujudkan potensi penuh mereka sebagai manusia. Kajian ini menggunakan strategi penelitian kepustakaan untuk mengkaji persoalan pendidikan Islam yang didera oleh berbagai macam persoalan bangsa yang secara tidak proporsional menimpa generasi muda saat ini. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, krisis multidimensi dan isu-isu pendidikan kontemporer; pergeseran penekanan dari guru dan menuju siswa; masalah kurikulum; dan pergantian guru dan tenaga kependidikan serta kualitas keseluruhan yang rendah. Kebijakan pendidikan telah bergerak ke arah tersebut dengan: (1) memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dalam menetapkan aturan mereka sendiri dalam konteks yang unik, Pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan dukungan dan pengawasan dalam dunia pendidikan; (2) desentralisasi pendidikan yang memberikan kebebasan untuk menentukan kebijakan berdasarkan kondisi lembaga pendidikan Islam; (3) pendidikan bertanggung jawab yang diatur dengan transparansi; (4) relevansi pendidikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat; dan (5) desentralisasi pendidikan yang memberikan kebebasan untuk menentukan kebijakan berdasarkan kondisi lembaga pendidikan Islam. Pendekatan substantif, bottom-up, deregulasi, dan kolaboratif adalah beberapa opsi yang disajikan

Kata Kunci: *Strategi Lembaga Pendidikan Islam, Tantangan Pendidikan Kontemporer*

Abstract

Every person has the right to an education, and that education should be designed to help them realize their full potential as a human being. This study employs a literature research strategy to investigate the issue of Islamic education, which is plagued by a wide range of national problems that disproportionately affect today's youth. These include, but are not limited to, multidimensional crises and contemporary education issues; shifts in emphasis away from teachers and toward students; curriculum problems; and teacher and educational staff turnover and low overall quality. Education policy has been moving in this direction by: (1) allowing schools more autonomy in setting their own rules in light of their unique contexts, Community empowerment to play an active role in providing support and supervision in the world of education; (2) decentralization of education allowing freedom to determine policies based on conditions of Islamic educational institutions; (3) responsible education governed by transparency; (4) relevance of education to the needs and conditions of society; and (5) decentralization of education allowing freedom to determine policies based on conditions of Islamic educational institutions. Substantive, bottom-up, deregulatory, and collaborative approaches are among the options presented.

Keywords: *Strategy of Islamic Education Institutions, Contemporary Education Challenges*

PENDAHULUAN

Rakyat Indonesia sedang membangun bangsa yang megah yang akan segera mampu bersaing dengan kemampuannya sendiri di sektor apapun. (Hasan & Anita, 2022a) Namun ada dua tantangan utama yang harus dihadapi Indonesia di sepanjang jalan, dan keduanya memperlambat pembangunan negara. Tantangan pertama datang dari dalam negeri sendiri, berupa krisis multifaset, lunturnya nilai-nilai solidaritas dan kemanusiaan, lunturnya persatuan bangsa, manajemen yang terfokus pada kebijakan pemerintah pusat, dan kurangnya bukti

bahwa lulusan dari sistem pendidikan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berhasil di dunia kerja. Kedua, hubungan internasional Indonesia yang meliputi pasar global di mana negara-negara bersaing secara bebas tanpa batas dan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin maju, memerlukan kepekaan dan respon yang cepat dari dunia pendidikan Indonesia untuk menghasilkan lulusan yang dapat bersaing, yang dapat beradaptasi dengan situasi baru, yang dapat berpikir kreatif dan inovatif, dan yang dapat bekerja sama untuk membangun jaringan tanpa batas.

Melihat kondisi tersebut, bangsa Indonesia harus cepat beradaptasi untuk dapat hidup, lepas dari segala tantangan, bahkan menunjukkan kehebatannya di kancah peradaban global. Sebagai bangsa yang besar, kita tidak bisa mengabaikan isu-isu terkini. Dengan semangat yang besar dan kekompakan bangsa, bangsa Indonesia akan mencapai cita-citanya yang tinggi. Menyempurnakan pendidikan dengan membangun sistem pendidikan yang sesuai dengan jati diri budaya bangsa, tetap terbuka terhadap segala perubahan yang terjadi, dan menjamin pendidikan nasional yang bertanggung jawab merupakan salah satu upaya bangsa Indonesia untuk mengatasi segala persoalan yang membebani. dia. Apabila upaya untuk memperbaiki sistem dan proses pendidikan dilakukan dengan tepat, maka akan terbukti bahwa bangsa Indonesia mampu berkembang, berkembang, dan meningkatkan martabatnya. (Hasan et al., 2022)

Keberhasilan bangsa Indonesia dalam menghadapi persaingan internasional sebagian besar bergantung pada kualitas pendidikannya. Bersama-sama, kita dapat mencapai tujuan pendidikan kita lebih cepat dan lebih efektif jika kita fokus pada peningkatan kualitas pendidikan yang kita berikan. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia menyatakan keinginan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan mulia ini, pekerjaan harus dimasukkan ke dalam program-program yang membentuk kebijakan pendidikan.

Pemerintah telah merumuskan dan menetapkan tujuan yang menjadi cita-cita besar bangsa Indonesia pada tahun 2003 yang tertuang dalam UU Republik Indonesia nomor 20 yang mengatur system pendidikan nasional yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (UU Nomor 20 Tahun 2003, n.d.)

Lembaga pendidikan Islam adalah salah satu sektor yang harus menghadapi isu-isu persoalan bangsa yang ada. Dengan bertambahnya jumlah lembaga Pendidikan serta ragam program studi yang ditawarkan, para pimpinan pendidikan Islam harus mampu bersaing secara sehat dan bersaing di kanca global yang lebih luas.

METODE

Dalam menulis karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode *library research*, yang mana penulis mengumpulkan data dan informasi penting terkait dengan strategi, tantangan dan isu pendidikan Islam dengan cara menelaah buku-buku, literatur, catatan, budaya, nilai, moral dan norma.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Masalah-Masalah Kekinian

Guru besar bidang ilmu pendidikan karakter dan seorang psikolog yang berasal dari Cortland University, Thomas Lickona mengemukakan sepuluh tanda jaman sebagai isyarat kehancuran sebuah bangsa. Tanda-tanda dimaksud ialah "(1) remaja bersifat anarki, (2) kurang sopan santun dalam berbicara, (3) terpengaruh kelompok sosial dalam bertindak kekerasan, (4) tindakan menganiaya dirisendiri, (5) tidak adanya aturan dan model yang membedakan baik dan buruk, (6) bersifat pasif dan jumud, (7) kurangnya penghormatan pada orang tua, (8) sifat acuh dan rasis (9) kebohongan yang merajalela (10) ketidakpercayaan antar golongan dan timbul kecurigaan." (Hamied, F.A., 2008)

Sepuluh gejala yang diidentifikasi oleh Thomas Lickona telah mewujudkan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dan telah menjadi perhatian nasional dengan berbagai tingkat kekuatan, terutama sejak krisis kisruh di akhir tahun 1997. Oleh karena itu, ujaran kebencian, kebebasan berekspresi atas nama yang tidak proporsional HAM, kekerasan, dan penyebaran hoax tampaknya menjadi fenomena yang terjadi di Indonesia..

Mereka mencoba membenarkan tindakan mereka dengan mengklaim bahwa mereka melakukannya atas nama reformasi, kebebasan demokratis, dan hak asasi manusia. Diawali dengan berbagai teguran, diskusi,

dan saran untuk menyelesaikan permasalahan yang dilontarkan oleh pemerintah, pendidik, dan cendekiawan muslim terhadap pendidikan yang sistemnya tidak jelas, khususnya pendidikan agama dan akhlak. Isu-isu ini telah diangkat terhadap pendidikan dengan sistem yang tidak jelas.

Menanggapi keprihatinan dan usulan di atas, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 20 tentang Landasan Hukum Sistem Pendidikan Nasional pada tahun 2003. Undang-undang tersebut membuat pendidikan yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama setara. Kedua lembaga tersebut berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi untuk mencapai tiga tujuan utama: (a) meningkatkan akses untuk memperluas jangkauan pendidikan dan meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan; (b) meningkatkan kualitas pendidikan dengan memenuhi standar nasional dan menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas; dan (c) menyempurnakan kurikulum pendidikan agar relevan dengan perubahan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Pemerintah mengalokasikan 20% dari keseluruhan uang APBN untuk mendukung inisiatif reformasi pendidikan. Pertanyaannya kemudian menjadi, Dapatkah langkah-langkah ini meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia secara signifikan?

Untuk mengurangi kerusakan yang mungkin terjadi dengan mereformasi terlalu banyak hal sekaligus, lembaga pendidikan Islam perlu memiliki orientasi dan tujuan yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mengarah pada perbaikan pengelolaan pendidikan.

B. Tantangan Pendidikan Islam Kontemporer

1. Perubahan Pendekatan Pembelajaran

Sekolah pada masa kolonial, yang juga merupakan awal era industri berkembang, dirancang semata-mata untuk menghasilkan lulusan yang akan bekerja di pabrik dan tempat kerja lainnya. Karena pendidikan dipandang sebagai transmisi informasi dari guru ke siswa, pembelajaran hanya terjadi dalam satu arah; Akibatnya, siswa diharapkan untuk mematuhi instruksi dan tidak mengembangkan kemampuannya untuk berpikir kritis. Proses pembelajaran terus menggunakan gaya belajar khusus ini. Selain itu, kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan Islam kurang dapat beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman. Padahal saat ini kita hidup di era milenial yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan, dan sudah saatnya mengubah mentalitas mahasiswa yang berada pada posisi utama dalam hal sedang belajar. Di lembaga pendidikan Islam, strategi seperti penggunaan aplikasi pembelajaran, experiential learning, pembelajaran berbasis permainan, dan strategi serupa lainnya diterapkan. (Destrianjasari et al., 2022)

Mengikuti perkembangan zaman bukan berarti pendidikan Islam harus meninggalkan ciri khasnya sebagai lembaga pendidikan yang berada di garda terdepan dalam mendidik pribadi-pribadi yang bertaqwa dan berakhlak mulia yang tidak hanya mampu memecahkan masalah tetapi juga mampu memberikan solusi dan keputusan terbaik.

2. Perubahan Kurikulum Pendidikan Islam

Kurikulum berasal dari kata Bahasa latin yaitu *Criculate*, yang bermakna materi pelajaran. (Kurnali, 2020) Sedangkan dalam pendapat lain menyatakan bahwa kurikulum berasal dari kosa kata Bahasa Prancis yaitu *Courier*, difahami sebagai jalan lintasan pelari olahraga atletik. (Webster & McKechnie, 1979) Kurikulum merupakan pedoman dan ruang lingkup materi yang digunakan untuk mengantarkan pendidikan kepada tujuannya, maka kurikulum perlu dirancang dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang agar relevan baik di dalam lembaga maupun bagi masyarakat dunia luar.

Kurikulum direkomendasikan untuk dievaluasi kira-kira setiap dua tahun sekali. Perubahan kurikulum berfungsi sebagai pelengkap kurikulum yang datang sebelumnya. Hal ini merupakan bentuk perbaikan pemerintah dalam mengembangkan kurikulum dengan memperhatikan keseimbangan antara perkembangan iptek berbasis potensi, dan kebutuhan peserta didik yang selalu berubah dari waktu ke waktu.

3. Peningkatan Kualitas Pendidik

Pendidikan yang baik dan bermutu tidak mungkin terwujud jika prosesnya tidak diawali dengan peningkatan kompetensi dan kinerja guru. (Hasan & Anita, 2022b). Guru memainkan peran yang sangat penting dalam pendidikan, dan tidak mungkin memiliki pendidikan yang baik dan berkualitas tanpa mereka. Hal ini ditunjukkan dengan prestasi guru yang tercermin dari hasil ujian kompetensi guru (UKG) pemerintah yang dilaksanakan di Indonesia. Hal ini menjadi indikasi bahwa kualitas guru di Indonesia masih menunjukkan indikasi yang buruk. Rendahnya prestasi akademik yang terlihat pada siswa yang bersekolah di daerah tertentu juga merupakan indikasi rendahnya kualitas guru di sekolah tersebut. (Fathurrohman & Suryana, 2011)

Melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui: (1) rekrutmen yang ketat, akurat, dan bertanggung jawab; (2) Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan; (3) Pengembangan Karir dan sertifikasi; (4) terciptanya iklim organisasi dan budaya kerja; (5) peningkatan kesejahteraan; dan (6) peningkatan manajemen Sumber Daya Manusia di lembaga pendidikan..

4. Pembinaan Peserta Didik

Peningkatan pembelajaran siswa adalah hasil dari upaya manajer untuk mengatur, mengarahkan, dan memantau kemajuan mereka. Saat membimbing siswa, penting untuk fokus membantu mereka mencapai potensi penuh mereka sehingga mereka dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan budaya komunitas mereka. Siswa memainkan peran penting dalam lembaga pendidikan; karena itu, penting untuk membuat keputusan yang paling tepat tentang apa yang harus diberikan dan diajarkan. (Warisno, 2019)

Melalui gagasan Nadiem Anwar Makarim, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menggemakan konsep pembelajaran yang mengusung kemandirian dan kebebasan dalam proses pembelajaran. Konsep pembelajaran ini juga harus mampu menjiwai seluruh aspek pendidikan Islam agar dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Tujuan dari gerakan kebebasan belajar adalah untuk membangun lingkungan baru untuk pendidikan, di mana siswa didorong untuk belajar sendiri dan menemukan informasi yang mereka butuhkan di dunia.

5. Kompetensi lulusan

Kompetensi lulusan membekali lulusan dengan kemampuan yang diperlukan untuk bersaing dengan sukses di era pasar global. Pendidikan harus mampu membekali peserta didik dengan kemampuan yang dibutuhkan di abad 21, yang meliputi: (1) kemampuan berpikir kritis, kepekaan terhadap lingkungan dan permasalahan di masyarakat; (2) kemampuan kreatif dan inovatif yaitu mampu berpikir untuk menciptakan banyak peluang dan solusi dari setiap permasalahan; dan (3) kemampuan berkolaborasi, yang meliputi kemampuan membangun jaringan seluas-luasnya, kemampuan memimpin dan dipimpin, dan kemampuan bekerja sama untuk memecahkan masalah. (4) kemampuan komunikasi yang efektif, yang memungkinkan untuk mengungkapkan ide dan pemikiran yang sudah ada di kepala seseorang kepada orang lain.

6. Pengelolaan sarana dan Prasarana

Minimnya sarana dan prasarana, serta tidak efektifnya pengelolaan aset yang dimiliki merupakan kelemahan utama pendidikan Islam, meskipun masalah ini jarang terjadi. Hal ini perlu ditanggapi, dan harus segera diatasi, karena mendukung terselenggaranya pendidikan Islam. Penyelesaian bangunan dan infrastruktur yang diperlukan memastikan bahwa proses pendidikan akan berjalan sesuai rencana.

C. Arah Kebijakan Pendidikan

Agar kita dapat berdiri dengan percaya diri dan menunjukkan kepada dunia bahwa kita memiliki pendidikan yang kuat, kita memerlukan arah dan kebijakan reformasi pendidikan, seperti:

1. Penguatan Institusi Pendidikan. Regulasi dan kebijakan pendidikan berlaku untuk semua tingkatan kondisi, baik sekarang maupun yang akan datang, dan yang terpenting telah terbukti memberdayakan dan mengoptimalkan lembaga pendidikan; dengan memberikan otonomi yang sangat besar kepada mereka, diharapkan mereka mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi. Tujuan pemberdayaan adalah memberikan kepercayaan kepada sebanyak mungkin orang untuk mengelola dan mengatur dirinya sendiri dengan penuh tanggung jawab.
2. kemerdekaan dalam pendidikan. Ketika manajemen pendidikan secara keseluruhan terkendala, seperti di masa lalu, keragaman lembaga pendidikan dalam hal jenis dan kekhususan menjadi tidak relevan. Desentralisasi pendidikan dimaksudkan untuk mewujudkan setiap program dan penerapannya sesuai dengan ketentuan masing-masing lembaga pendidikan dan untuk menjamin keberhasilan dan efisiensi pendidikan..
3. Tanggung Jawab Pendidikan Untuk dapat menunjukkan aktivitas dan prestasinya, lembaga dan penyelenggara pendidikan seringkali melupakan tanggung jawab yang telah diberikan. Agar lebih akuntabel kepada publik, lembaga pendidikan harus mampu bertindak secara bertanggung jawab sesuai dengan kebutuhan dan nilai yang telah mereka identifikasi. Selain menimbulkan biaya besar, kegiatan pendidikan juga harus ditimbang terhadap hasil mereka, yaitu sejauh mana tujuan tercapai melalui usaha yang berarti.
4. Relevansi Kurikulum Pendidikan. System pendidikan dan kurikulum harus terus diperbaiki dan di perbaharui terus secara berkesinambungan , idealnya kurikulum di tinjau dua tahun sekali untuk melihat sesesuai dan

relevansi, kurikulum harus memiliki relevansi secara internal dimana seluruh komponen kurikulum memiliki hubungan dan keterkaitan, mulai dari tujuan, konten materi, pendekatan, model, metode, alat dan evaluasi harus saling terkait. Sedangkan relevansi eksternal kurikulum harus mampu menjawab tantangan zaman.

5. Pemberdayaan Masyarakat Sebagai pemangku kepentingan dalam pendidikan, sekelompok orang yang bekerja sama dan bekerja sama dapat memberikan dampak yang signifikan. Masyarakat harus diberdayakan secara finansial dan substansial untuk berpartisipasi dalam proses pendidikan, dan sementara pemerintah harus memberikan dukungan untuk sistem pendidikan, masyarakat juga untuk mengambil bagian dalam organisasi pendidikan dan untuk mengawasi sistem pendidikan semua di sekitarnya.

D. Penetapan Arah Dan Tujuan Pendidikan Islam

1. Pentingnya Penetapan Arah dan tujuan Pendidikan

Pasal 3 undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa”. Amanat ini tertuang dalam undang-undang yang menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat. kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, berpikir kreatif dan inovatif, mengembangkan diri secara mandiri menjadi warga negara yang bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Agar madrasah sebagai lembaga pendidikan disertai tanggung jawab mengemban amanah dan mampu memenuhi harapan dan tujuan pendidikan, maka madrasah perlu melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan seefektif mungkin. (UU Nomor 20 Tahun 2003, n.d.)

Pengelolaan sekolah yang tidak dilakukan dengan baik dapat memperlambat gerak siswa untuk melaksanakan fungsi pendidikan formal. Dokumen ini memberikan panduan tentang bagaimana merancang, mengimplementasikan, dan mengelola sekolah untuk mencapai hasil yang diinginkan. Rencana strategis harus memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan upaya pencapaiannya bagi semua pengelola institusi. Hal ini memungkinkan lembaga memiliki kebijakan untuk membantu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. (Irawan et al., 2021)

2. Hakikat Perencanaan

Dalam sebuah kegiatan manajemen, peran perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan. Sebuah perencanaan, berangkat dari sebuah kondisi sekarang hingga merencanakan kondisi yang diharapkan, sehingga kegiatan perencanaan membutuhkan keseriusan dan pandangan jauh kedepan, karena perencanaan menyangkut langsung dengan kegiatan yang akan dilakukan masa depan. (Muhaimin et al., 2015)

Perencanaan menentukan tujuan, arah dan strategi institusi adalah untuk menghadapi tantangan zaman globalisasi dalam hal lembaga pendidikan khususnya lembaga Islam dalam hal peningkatan hasil dan kualitas dan prestasinya. (Hasan & Anita, 2022a)

Perencanaan ialah bagian berarti dari suatu kesuksesan. Tidak bisa dibayangkan bila seorang sukses tanpa perencanaan. Jika sukses sehingga keberhasilan yang didapat bisa jadi bertabiat semu. Dalam manajemen, para pakar manajemen memposisikan perencanaan selaku kegiatan awal aktivitas. Saat sebelum menejer melaksanakan aktivitas pengkoordinasian, kepemimpinan, penilaian serta yang lain, dia terlebih dulu wajib menetapkan rencana yang menjadi pedoman arah organisasi, memastikan apa yang hendak serta kapan dikerjakan, gimana mengerjakannya, serta siapa yang hendak mengerjakannya. Ini menunjukkan bahwa perencanaan menempati posisi strategis. (Imron & Burhanuddin, 2004)

E. Strategi Lembaga Pendidikan Islam

Webster's New Word Dictionary mengartikan bahwa strategi merupakan suatu bidang kajian tentang perencanaan serta pengarahan keahlian pembedahan militer pada skala besar untuk mengendalikan serta merancang. terutama digunakan dunia militer, ataupun dalam kosa kata bahasa Yunani berasal dari kata *Strategem*, yang yang difahami sebagai memimpin tentara. (Maimun & Fitri, 2010) Manajemen strategis merupakan seni serta ilmu penataan, pelaksanaan, serta pengevaluasian keputusan lintas fungsi yang bisa membolehkan sesuatu industri mencapai sasarannya. (Bombang, 2008)

Manajemen strategis melibatkan pengamatan dan penilaian lingkungan eksternal untuk peluang dan bahaya, serta lingkungan internal untuk kekuatan dan kelemahan, yang mungkin berguna di masa depan untuk

bisnis melalui penerapan analisis SWOT elemen strategis.(Mulyasa & Mukhlis, 2006)

Lembaga-lembaga yang ditugasi memajukan strategi pendidikan Islam harus terus memperhatikan maksud dan tujuan agama, serta pertumbuhan dan penyempurnaan nilai-nilai intinya, dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat tersebut di atas. Namun, walaupun pendidikan Islam memiliki pelindung moral dan mental, harus tetap kuat dan tidak apriori terhadap tren pendidikan yang dibawa oleh globalisasi..

Untuk mencapai hal tersebut, penulis menyuguhkan empat pandangan strategi yang ditawarkan oleh Sirozi: strategi substantif, bottom-up, deregulasi, dan kolaboratif.(Alim, n.d.) :

1. strategi substantive.

Dalam rangka memberikan pelayanan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, pendidikan Islam harus menyediakan paket layanan pendidikan yang lengkap. Jika mengacu pada taksonomi Bloom, teknik penyajian dan program pendidikan harus mampu mengakomodasi semua bagian kemampuan siswa, meliputi ranah emosional (sikap), kognitif (pengetahuan), dan ranah psikomotor (keterampilan).

Jika penyajian dan program pendidikannya menganut konsep UNESCO, maka proses pembelajaran meliputi lima kompetensi yaitu learning to know (mendapatkan pengetahuan), learning to do (mendapatkan kemampuan untuk melakukan sesuatu), learning to be (menjadi diri sendiri), learning to live. bersama (mendapatkan kemampuan untuk hidup bersama orang lain), dan belajar mengenal Tuhan (belajar untuk dapat percaya kepada Tuhan). Jika semua komponen dan kompetensi ini diberikan secara terpadu, bukan lagi mimpi bahwa lulusan lembaga pendidikan Islam akan mampu menyeimbangkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan gagasan mereka dalam mengejar aktualisasi diri..

2. strategi bottom-up.

Lembaga pendidikan Islam harus dimulai dari dasar. Ide dan rancangan program dan lembaga pendidikan Islam harus disesuaikan dengan bakat, lingkungan dan struktur masyarakat, dan tidak dipaksakan dari atas. Proses perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan lembaga pendidikan Islam harus melibatkan masyarakat luas dan memperhatikan kondisi, kemampuan, dan kebutuhan aktual penghuninya. Strategi ini diperlukan agar lembaga pendidikan Islam tidak terkesan menjadi bagian dari rezim manajemen, dan agar tidak ada lagi yang perlu dilakukan dengan strategi tertentu yang akan dihilangkan karena ketidaksenangan kita terhadap pengelola dan lembaga yang sebelumnya hanya membuat jejak kaki dan jejak kaki orang lain. Agar memiliki rasa kepedulian, rasa memiliki (atribusi), dan tanggung jawab, seluruh bagian lembaga dan masyarakat luas harus dilibatkan (tanggung jawab).

Dengan demikian, lembaga pendidikan Islam tidak dipandang sebagai komoditas eksotik atau barang antik oleh masyarakat di sekitarnya karena keberadaannya sangat mengakar kuat di tengah masyarakat. Lembaga-lembaga Islam secara serius mengembangkan gagasan pendidikan berbasis masyarakat dan membentuk serta memberdayakan komite sekolah, yang dikenal sebagai majlis madrasah, sebagai elemen penting dari proses adopsi strategi dari bawah ke atas. Badan-badan ini tidak hanya perlu ditata melalui cara-cara demokratis untuk menumbuhkan lembaga-lembaga pendidikan, tetapi juga agar dapat berkembang menjadi organisasi-organisasi yang benar-benar otonom dan efektif..

3. strategi deregulatory.

Institusi Pendidikan Islam sebisa bisa jadi buat tidak begitu terikat oleh ketentuan yang terpusat yang sentralistik. sebisa bisa jadi dibutuhkan ketentuan kebijakan spesial dari Departemen Agama ataupun jajaran pemerintah wilayah supaya tidak terkesan liar, yang membuat lembaga- lembaga Islam leluasa berkreasikan, berinovasi serta berimprovisasi, dan program- program yang cocok dengannya bisa dibesarkan. Kebebasan ini dibutuhkan buat menjadikan institusi pembelajaran Islam selaku lembaga pembelajaran alternatif. Dengan kata lain, bukan peniru, melainkan lembaga pendidikan pelopor dengan karakteristik khas serta keunggulan yang unik.

4. strategi cooperative.

Untuk memanfaatkan semua potensi dan sumber daya organisasi, lembaga pendidikan Islam harus dikelola dengan gaya manajemen yang menekankan persatuan dan kolaborasi, bukan upaya yang terputus-putus. Sumber daya yang dimiliki harus dimaksimalkan dan dimanfaatkan untuk memajukan lembaga pendidikan dengan merangkul rekomendasi dan masukan dari dalam dan luar organisasi.

Pada masa sekarang, lembaga pendidikan Islam harus menginisiasi pembangunan dan pengembangan

jaringan kerjasama dan kemitraan baik dari dalam maupun luar pendidikan Islam. Jaringan ini bertujuan untuk membangun institusi sektor atau proses pembelajaran, meningkatkan sumber daya manusia, dan meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas.

Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pendidikan dalam mendukung dan mengantarkan lulusannya menuju kesuksesan, lembaga pendidikan juga harus mampu mengkoordinir lulusan dan alumni. Namun, kebutuhan jaringan alumni yang kuat tidak akan menjadi faktor dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam.

Apalagi kerjasama yang berdampak positif bagi perkembangan kedua belah pihak akan meningkatkan pendapatan lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam harus mengambil inisiatif untuk memilih tujuan mereka sendiri dan memiliki akal dalam memperluas akses mereka ke sumber daya keuangan yang dapat diakses, seperti sektor keagamaan dan yayasan yang mengaturnya.

SIMPULAN

Lembaga pendidikan Islam menentukan arah, tujuan, dan strategi yang diperlukan dengan menganalisis keadaan lingkungan internal dan eksternal organisasi untuk mengidentifikasi kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman eksternal mereka sendiri. Penetapan status merupakan pedoman untuk mengawali langkah awal pengembangan dan pengelolaan lembaga pendidikan Islam dalam menjawab persoalan dan tantangan pendidikan agar dapat terus eksis dan mengembangkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di dunia yang semakin kompetitif. Strategi peningkatan dan peningkatan mutu pendidikan Islam harus dimulai dengan penyediaan program layanan yang komprehensif berdasarkan kemampuan yang terkait dengan ranah afektif, kognitif, dan psikomotor serta didukung oleh regulasi yang terdesentralisasi dan teregulasi serta peningkatan kerjasama pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, N. (n.d.). *LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM: Antara Realitas dan Kemestian Pengembangannya* | PRODI BPI DAKWAH. Retrieved November 15, 2022, from <https://prodibpi.wordpress.com/2010/08/05/lembaga-pendidikan-islam-antara-realitas-dan-kemestian-pengembangannya/>
- Bombang, A. (2008). *Manajemen Strategis Kepemimpinan Pendidikan / Tony Bush*. Ircisod.
- Destrianjasari, S., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). PENGERTIAN, TEORI DAN KONSEP, RUANG LINGKUP ISU-ISU KONTEMPORER PENDIDIKAN ISLAM. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(2), 2442–9511. <https://doi.org/10.36312/JIME.V8I2.3304>
- Fathurrohman, P., & Suryana, A. (2011). Supervisi Pendidikan dalam Pengembangan Proses Pengajaran - UIN Sunan Gunung Djati Bandung. In *Refika Aditama*. <https://uinsgd.ac.id/supervisi-pendidikan-dalam-pengembangan-proses-pengajaran/>
- Hamied, F.A., S. (2008). *Pendidikan di Indonesia: Masalah dan Solusi*. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Hasan, M., & Anita, A. (2022a). Implementasi Supervisi Akademik Dalam Meningkatkan Kompetensi Dan Kinerja Guru Di MA Al Ishlah Natar Dan MA Mathlaul Anwar Cinta Mulya. *At-Tajdid : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 6(1), 85–97. <https://doi.org/10.24127/ATT.V6I1.2144>
- Hasan, M., & Anita, A. (2022b). IMPLEMENTASI SUPERVISI AKADEMIK DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN KINERJA GURU DI MA AL ISHLAH NATAR DAN MA MATHLAUL ANWAR CINTA MULYA. *At-Tajdid : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 6(1), 85–97. <https://doi.org/10.24127/ATT.V6I1.2144>
- Hasan, M., Warisno, A., Harahap, N., Hidayati Murtafiah, N., & Agama Islam An Nur Lampung, I. (2022). Implementasi Manajemen Mutu Terpadu Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan Di SMP IT Wahdatul Ummah Kota Metro. *An Naba*, 5(2), 34–54. <https://doi.org/10.51614/ANNABA.V5I2.156>
- Imron, A., & Burhanuddin. (2004). *Perspektif manajemen pendidikan berbasis sekolah / Editor, Maisyarah, Burhanuddin, Ali Imron* | OPAC Perpustakaan Nasional RI. UM Press.
- Irawan, T., Hasan, M., & Fernadi, Feri, M. (2021). Supervisi Akademik Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Mubtadi'in Jati Agung Tahun Pelajaran 2020/2021. *Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan Dan Ilmu Keislaman*, 7(2), 47–67.

- Kurnali. (2020). *Kapita Selekta Pendidikan Mengurai Benang Kusut Pendidikan Islam*. 191.
- Maimun, A., & Fitri, A. Z. (2010). *Madrasah unggulan: Lembaga pendidikan alternatif di era kompetitif*.
- Muhaimin, Suti'ah, & Prabowo, S. L. (2015). *Manajemen Pendidikan (Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sek... - Google Books*. PT Kharisma Putra Utama.
- Mulyasa, E., & Mukhlis. (2006). *Menjadi kepala sekolah profesional*. Remaja Rosda Karya. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=552405>
- UU Nomor 20 Tahun 2003* . (n.d.). Retrieved November 15, 2022, from <https://jdih.kemendiknas.go.id/katalog-1016-produk-hukum>
- Warisno, A. (2019). Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Mutu Lulusan Pada Lembaga Pendidikan Islam Di Kabupaten. *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 3(02), 99. <https://doi.org/10.32332/riayah.v3i02.1322>
- Webster, N., & McKechnie, J. L. (1979). *Webster's new twentieth century dictionary of the English language, unabridged : based upon the broad foundations laid down by Noah Webster*. xiv, 2129, 160 p., [24] leaves of plates.